

12 PEJABAT PEMKAB BANYUMAS DILANTIK

Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

BANYUMAS (KR) - Sebanyak 12 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie, Jumat (1/11) di Pendapa Wakil Bupati Banyumas.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banyumas, Eko Prijanto mengatakan, para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai dinas. Di antaranya Inspektorat Daerah Banyumas Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar), Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda), serta Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

"Pejabat yang dilantik mencakup beberapa kategori jabatan fungsional. Di antaranya Pejabat Pengelola Barang dan Jasa (PP-

BJ) Ahli Madya, Pengawas Pemerintahan (PPUPD) Ahli Madya, Auditor Ahli Madya. Juga sejumlah posisi lain seperti auditor kepegawaian ahli madya, pengantar kerja ahli muda, analis kebijakan ahli muda, analis SDM aparatur ahli muda, dan arsiparis muda," jelas Eko Prijanto.



Sekda Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie melantik pejabat fungsional.

DI KABUPATEN SUKOHARJO

Kekeringan dan Banjir Jadi Perhatian

SUKOHARJO (KR) - Kekeringan dan banjir masih menjadi perhatian besar kerawanan bencana alam ditengah kondisi peralihan cuaca. Saat ini warga wilayah selatan yang terdiri dari tiga kecamatan masih kekurangan air bersih. Di sisi lain, sekarang sudah masuk peralihan musim hujan disertai angin kencang yang berdampak banjir dan pohon tumbang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo mengatakan petugas dan peralatan wilayah khususnya di tiga kecamatan meliputi Kecamatan Tawangsari, Weru dan Bulu, masih terjadi kekeringan dampak cuaca panas. Akibatnya warga kekurangan air bersih.

BPBD Sukoharjo menganggap kerawanan bencana alam baik kekeringan

dan banjir sama, mengingat kondisi sekarang masih masuk peralihan cuaca dari kemarau ke hujan. Dalam posisi ini, sebagian wilayah khususnya di tiga kecamatan meliputi Kecamatan Tawangsari, Weru dan Bulu, masih terjadi kekeringan dampak cuaca panas. Akibatnya warga kekurangan air bersih.

Kebutuhan air bersih warga di tiga kecamatan tersebut sudah dipenuhi

Sekda Agus Nur Hadie yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar menyampaikan bahwa pejabat fungsional memiliki peran strategis dalam mencapai visi besar Pemerintah Kabupaten Banyumas. "Sebagai pejabat fungsional, memiliki peran spesifik yang sa-

ngat penting dalam mewujudkan tujuan besar pemerintah, yakni memberikan pelayanan publik yang prima, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Agus juga menekankan bahwa setiap pejabat harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta selalu berkomitmen pada prinsip-prinsip etika dalam bekerja. "Setiap tugas dan fungsi yang diamanatkan harus dijalankan dengan segenap hati dan satu tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Banyumas," tandasnya.

Sekda berharap pelantikan ini menjadi momentum bagi para pejabat fungsional untuk meningkatkan motivasi dan semangat baru dalam melayani masyarakat. "Semoga amanah, yang Saudara emban membawa manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi seluruh masyarakat Banyumas," pungkasnya. **(Dri)-d**



KR-Toto Rusmanto

Polisi sedang meredam ketegangan antarpendukung saat debat pasangan calon bupati.

DIWARNAI KETEGANGAN ANTARPENDUKUNG Debat Paslon di Purbalingga

PURBALINGGA (KR) - Ketegangan antarpendukung sempat terjadi saat berlangsung acara debat calon bupati dan wakil bupati Purbalingga di Braling Grand Hotel, Sabtu (2/11) malam. Situasi itu dipicu masing-masing pendukung yang saling meneriakkan yel-yel, sehingga moderator debat sempat menghentikan acara tersebut.

Polisi yang berjaga di lokasi bertindak cepat meredam ketegangan, dibantu personel TNI dan petugas keamanan KPU, membentuk pagar betis di antara dua kelompok pendukung agar tidak terjadi bentrokan. Upaya petugas keamanan berhasil meredam ketegangan. Hingga debat berakhir situasi dapat dikendalikan oleh petugas pengamanan. "Ketegangan terjadi pada sesi debat keempat. Masing-masing pendukung saling meneriakkan yel-yel sehingga sempat menimbulkan sedikit ketegangan. Namun petugas pengamanan sudah mengantisipasi," tutur Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto yang memimpin pengamanan acara debat tersebut.

Sebelumnya, Kapolres sudah bersepakat dengan para pemimpin rombongan masing-masing paslon agar sama-sama menjaga kondisi. Pemimpin rombongan wajib mengendalikan anggotanya dan tidak saling memprovokasi dan menjaga agar tidak terprovokasi.

Setelah acara debat usai, Kapolres juga memimpin anggotanya mengatur kepulungan rombongan pendukung masing-masing paslon. Polisi membagi massa menjadi dua shift. "Supaya tidak terjadi *crowded*, arus lalu lintas lancar dan tidak terjadi gesekan yang bisa memicu timbulnya konflik," jelas Kapolres. Sementara itu sebagian personel polisi dan TNI melakukan patroli secara terus-menerus untuk memantau situasi, menghindari penumpukan massa maupun potensi adanya provokasi antara pendukung paslon. **(Rus)-f**

DIUNGKAP POLRES SUKOHARJO

Kasus Narkoba di Kartasura



KR-Dokumen Polres Sukoharjo

Petugas Polres Sukoharjo menyampaikan keterangan terkait kasus narkoba di Kartasura.

SUKOHARJO (KR) - Satuan Reserse Narkoba Polres Sukoharjo kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kali ini pengungkapan terjadi di wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit melalui Kasat Reserse Narkoba Iptu Ari Widodo, dalam keterangannya, Senin (4/11), mengatakan bahwa dalam pengungkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial SA (40) warga Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Iptu Ari Widodo menjelaskan, pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut berawal ketika kepolisian sedang berpatroli dan mendapati seseorang yang bertingkah mencurigakan di wilayah Kecamatan Kartasura. Dalam pemeriksaan, didapati satu paket plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba golongan I, bukan tanaman.

Sementara itu dari pengembangan di rumah pelaku, polisi mendapatkan barang bukti lain berupa 2 pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran, 2 plastik klip tembus pandang bekas bungkus narkoba golongan I, tutup botol minuman yang dilubangi, 2 sedotan plastik warna putih, dan korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi. **(Mam)-d**

Peserta JKN Harus Dapat Layanan Adil

KARANGANYAR (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar meraih penghargaan kategori pratama, dalam capaian *Universal Health Coverage* (UHC) dari BPJS Kesehatan. Saat ini 98 persen warga Bumi Intanpari menjadi peserta JKN. Dengan capaian itu, seharusnya setiap warga dalam populasi, memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Juga bermutu, dengan biaya terjangkau.

Ketua Komisi D DPRD Karanganyar Ali Akbar mengatakan pemerintah wajib memastikan para peserta JKN di Bumi Intanpari terlayani kebutuhannya di semua faskes. Jangan ada lagi diskriminatif dan layanan kesehatan terlambat diberikan. "Tinggal sedikit yang belum terkaver JKN. Harapannya, yang belum itu disisir. Kemudian jika tidak mampu secara finansial, agar dikover APBD," ungkap Ali, Senin (28/10).

Anggota DPRD Karanganyar periode 2024-2029 ini menyadari perubahan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan peserta JKN dalam membayar iuran. Terutama bagi karyawan usai diberhentikan perusahaan. Mereka sebelumnya berstatus pekerja penerima upah badan usaha (PPU). Mereka yang kini pengangguran atau sedang mencari kerja itu tetap membutuhkan jaminan kesehatan. "Kita berusaha memaksimalkan UHC. Ada skala-skala prioritas yang harus dikaver," kata pria yang juga pengurus DPD PKS Karanganyar ini. **(Lim)-d**



KR-Said Masykuri

Simulasi tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 di Sragen.

mulasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan pendalaman ketentuan pelaksanaan serta mengukur efektivitas kinerja dan efisiensi waktu penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan

di TPS oleh KPSS.

Proses tersebut, kata dia, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum, khususnya terhadap empat hal. Keempat hal itu terdiri atas alur pemungutan

dan penghitungan suara; penggunaan surat suara; penggunaan formulir dan tata cara pengisiannya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; serta penggunaan sampul dan logistik lainnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan penggunaan Sirekap Pilkada.

Saat pelaksanaan simulasi, kabupaten menyiapkan petugas untuk mencermati kinerja petugas KPSS simulasi serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan simulasi. Hal-hak yang diawasi terdiri atas proses dalam menerima dan menyiapkan logistik yang diterima dari penyelenggara simulasi; pengaturan jam kedatangan dalam formulir Model C. **(Sam)-d**

KASUS VIDEO HOAKS DI BANYUMAS

Laporan Diteruskan ke Kepolisian

BANYUMAS (KR) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Sabtu (3/11) meneruskan laporan dugaan penyebaran video hoaks di grup WhatsApp 'Banyumas Bebas

Bicara' yang masuk pada tanggal 30 Oktober 2024, ke Reskrim Polresta Banyumas. Koordinator Sentra Gakkumdu Banyumas, Yon Daryono menjelaskan bahwa kasus tersebut telah dipelajari dan

diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan Bawaslu Banyumas, jenis dugaan pelanggaran dalam kasus ini tidak berada dalam ranah Undang Undang Pemilu yang bisa ditangani oleh Bawaslu. Dugaan pelanggaran yang terindikasi lebih relevan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Kami telah melakukan pleno pada 1 November 2024 untuk membahas laporan tersebut," jelas Yon Daryono.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, lanjut Yon, Bawaslu memiliki waktu 1X24 jam untuk meneruskan laporan yang berada di luar lingkup UU Pemilu, ke pihak berwenang. Sesuai ketentuan tersebut, pada

Sabtu 2 November 2024 pukul 14.15 WIB, Bawaslu Banyumas resmi meneruskan kasus tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polresta Banyumas, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dikatakan, penyerahan kasus tersebut ke kepolisian menunjukkan keseriusan Bawaslu Banyumas dalam menindaklanjuti setiap laporan yang berpotensi mengganggu keterbukaan informasi, khususnya yang mengandung unsur hoaks. Hal itu agar dapat ditangani oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bawaslu Banyumas berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi dan menyebarkan informasi, terutama yang berhubungan dengan isu-isu sensitif menjelang pemilihan. Dengan demikian, stabilitas dan ketertiban dalam proses pemilu dapat tetap terjaga. **(Dri)-d**



KR-Istimedia

Koordinator Sentra Gakkumdu Banyumas Yon Daryono menyerahkan dokumen pelaporan ke Reskrim Polresta Banyumas.